AKUNTABILITAS DANA DESA DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA : STUDI KASUS DESA LAHA, KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA

Meidylisa Patty¹

¹Staf Pengajar Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon
Email: meydips@gmail.com

ABSTRACT

The allocation of village funds has been an important issue since the issuance of the LAW on village independence in 2016. This research aims to study more about the accountability of allocation of village funds and its influence on community empowerment and Village development. The method of analysis used is qualitative descriptive analysis with data retrieval techniques that are surveys and interviews. Research object in Laha Village, the Bay district of Ambon Baguala, Maluku. The results showed that the management of the village funds are normative and administrative has been implemented as it should but is substantive there is still error due to some factors such as accountability and transparency which is still weak where the village apparatus has not fully socialized the budget plan and programs to the community, still strong element of kinship in the process of allocation of village funds and community participation that lacks

Keywords: Village fund allocation, accountability, empowerment, development

ABSTRAK

Alokasi dana desa menjadi isu penting sejak dikeluarkannya UU tentang kemandirian desa di tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai akuntabilitas pengalokasian dana desa dan pengaruhnya terhadap pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Metode analisa yang digunakan yakni analisa deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data yaitu survey dan wawancara. Objek penelitian pada desa Laha kecamatan teluk Ambon Baguala, Maluku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa secara normative dan administratif sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun secara substantive masih terdapat kesalahan dikarenakan beberapa factor diantaranya akuntabilitas dan transparansi yang masih lemah dimana pihak aparat desa belum sepenuhnya mensosialisasikan rencana anggaran dan program-program kepada masyarakat, masih kuatnya unsur kekerabatan dalam proses pengalokasian dana desa dan partisipasi masyarakat yang kurang dalam mewujudkan program pembangunan desa Laha

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, Pemberdayaan, Pembangunan

PENDAHULUAN

Undang-undang no 6 tahun 2014 menyatakan bahwa desa memiliki kemandirian dalam proses pembangunan. Hal ini menjelaskan bahwa desa memiliki kewenangan sendiri dalam hal mengelola segala infrastrukturnya dalam pembangunan terutama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat desa. Seperti yang diketahui pertumbuhan ekonomi pedesaan sangatlah lamban jika dibandingkan dengan daerah perkotaan. Tingkat kemiskinan masyarakat yang tinggal di desa menyebabkan factor lambannya pembangunan desa. Selain itu dana dari pemerintah yang tidak merata dan lamban juga merupakan penyebab lambannya pembangunan desa (Nurfaisal dan Mutiarin,2019). Untuk meminimalisir hal tersebut, desa membutuhkan perhatian pemerintah dan stakeholder dalam proses pembangunan. Salah satu yang dibutuhkan desa adalah dana desa. Dana desa bersumber dari APBN yang kemudian disalurkan atau ditransfer melalui rekening kas umum daerah (RKUD) dan akan ditransfer lagi ke rekening kas desa (RKD) sebagai tempat penyimpanan dana desa dari pemerintah. Dana desa ini selanjutnya akan dikelola oleh desa secara akuntabel dan transparan.

Alokasi dana desa akan digunakan untuk kebutuhan desa yang mencakup pelayanan,pembangunan infrastuktur desa dan pemberdayaan masyakat desa. Dana desa harus benar-benar dialokasi secara akuntabel sesuai dengan undang-undang pengelolaan keuangan public yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan public haruslah transparans dan dapat diakses oleh khalayak. Aksesibilitas yang dimaksud berupa publikasi segala bentuk kegiatan terkait penggunaan dana desa,rapat koordinasi desa dan masyarakat dan juga publikasi laporan keuangan yang didalamnya terdapat rincian penggunaan dana desa tersebut (Fajar dalam Nurfaisal,2019).Kerjasama masyarakat desa dengan aparatur desa dalam rangka mewujudkan program-program pembangunan desa sangat dibutuhkan guna menciptakan sumber daya manusia yang berdaya guna. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan program yang penting diwujudkan mengingat SDM di desa memiliki potensi yang cukup besar untuk mengembangkan ketrampilan dengan memanfaatkan SDA yang dihasilkan desa tersebut. Program-program pembangunan desa disusun oleh pihak pemerintahan desa bersama masyarakat agar bisa diketahui potensi-potensi apa yang menjadi focus desa dalam pembangunan dengan menggunakan dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat ke tiap-tiap desa di Indonesia.

Desa Laha,kecamatan teluk Ambon Baguala adalah salah satu desa di propinsi Maluku yang menerima dana desa. Di tahun 2016, desa laha telah merealisasikan program pembangunan desa yang disebut PKT dengan membangun tambatan perahu nelayan dan permandian umum dengan besaran anggaran masing-masing sebesar Rp.407 juta untuk tambatan perahu nelayan dan permandian umum sebesar Rp.150 juta. Sementara pada 2017 ada sejumlah proyek yang berjalan, yakni jalan lingkungan dengan volume 11,616 meter persegi, saluran drainase (5,284), talud (607), sarana olah raga (empat buah), posyandu (tiga buah), jamban (delapan), PAUD (tiga), jembatan (tiga), dan penyediaan air bersih (2,161 meter persegi) (Teras id news). Realisasi dana desa yang dilakukan desa Laha menjadikan desa Laha sebagai desa dengan manajemen dana desa terbaik tahun 2018. Namun terdapat beberapa desa di Maluku yang belum mampu mengelola dana desa sehingga penyelewenganpun terjadi. Ada 114 desa yang tersangkut masalah dana desa dan 25 kepala desa sudah dipenjara karena mendengan mealahgunakan dana

desa,(Tribun Ambon). Kasus penyalahgunaan dana desa di Maluku meningkat sampai pada akhir tahun 2019. Fenomena ini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk tetap tegas dalam pengelolaan dana desa dengan menyalurkan tim audit dan tenaga pendamping agar manajemen dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan.

Penelitian terdahulu terkait dana desa telah diteliti oleh Karimah et al,(2017) yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa factor yang menyebabkan pengelolaan dana desa menjadi tidak akuntabel dan transparan diantaranya peran kepala desa dan pihak kecamatan dalam pengalokasian dana desa yang terlalu dominan,budaya paternalistic yang menyebabkan masyarakat terkesan acuh dan tetap menaruh kepercayaan kepada kepala desa sebagai pengeola dana desa dan tidak dilibatkannya stakeholder secara penuh sehingga mereka belum maksimal menjalankan tugas dan perannya terkait pengelolaan dana desa. Hasil penelitian Nurfaishal et al (2019) baru-baru ini juga menunjukkan hasil yang sama yakni akuntabilitas pengelolaan dana desa Tegalrejo Gunung Kidul kurang baik disebabkan karena belum terperinci waktu pelaksanaan program desa,Laporan pengelolaan anggaran yang tidak transparan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa dan kurangnya koordinasi perangkat desa dengan rakyat terkait program pembangunan desa. Hasil yang konsisten juga ditunjukkan dalam penelitian Maspeke et al (2017) yang dilakukan di desa Doloduo Manado membuktikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan tanpa melibatkan masyarakat.Kepala desa tidak melihat SDM di desa tetapi melihat kekerabatan sebagai factor dalam pelaksanaan program desa.Berdasarkan fenomena-fenomena diatas dan penelitian-penelitian terdahulu, maka dirasa perlu untuk mengkaji pengelolaan dana desa di Maluku karena pengelolaan dana desa berimbas pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur desa ke depan.

KERANGKA TEORI

Alokasi Dana Desa

Menurut Rozaki dkk (2005, h.120) sesungguhnya kebijakan alokasi dana desa yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya (desa). Pola kebijakan pemerintahan kabupaten yang semula dominan dan sentralis, melalui metode alokasi dana desa ini berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan melalui asas desentralisasi.

Alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Adisasmita (2013) pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat perdesaan secara lebih efektif dan efisien, baik dari (a) aspek masukan atau input (sumberdaya manusia, dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan

teknologi; (b) dari aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan); (c) dari aspek keluaran atau output (pencapaian sasaran, efektivitas, dan efisiensi).

Tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi (2005) pada dasarnya yaitu untuk membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil serta untuk memberdayakan kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Menurut Elliot dalam Sumaryadi (2005) ada tiga strategi pendekatan yang dipakai dalam proses pemberdayaan masyarakat, antara lain: (a) the welfare approach yaitu membantu memberikan bantuan kepada kelompok- kelompok tertentu, misalnya mereka yang terkena musibah bencana alam dan pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk memberdayakan rakyat dalam menghadapi proses politik dan kemiskinan rakyat, (b) the development approach, pendekatan ini memusatkan perhatian pada pembangunan peningkatan kemandirian, kemampuan, dan keswadayaan masyarakat, (c) the empowerment approach, pendekatan ini melihat kemiskinan sebagai akibat proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaannya.

Manajemen

Secara etimologis kata manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno *menagement*, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Secara keseluruhan manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi. dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Menurut Terry (2010) Manajemen terdiri dari berbagai unsur, yakni *man, money, method, machine, market, material* dan *information*. *Man*: Sumber daya manusia; *Money*: Uang yang diperlukan untuk mencapai tujuan; *Method*: Cara atau sistem untuk mencapai tujuan; *Machine*: Mesin atau alat untuk memproduksi; *Materia*: Bahan- bahan yang diperlukan dalam kegiatan; *Market*: Pasaran atau tempat untuk melemparkan hasil produksi; *Information*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif . Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan pihak terkait atau pemilik data serta mengolah dokumen yang ditulis ulang menjadi paragraf. Moleong (2016) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif dirasa sangat tepat untuk digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan, karena penelitian ini sangat memberikan kesempatan yang luas kepada peneliti untuk memfokuskan kedalam permasalahan yang akan diteliti secara mendalam. Penelitian ini berlokasi di desa Laha kecamatan teluk Ambon Baguala dengan pertimbangan bahwa desa laha adalah lokasi strategis karena dekat dengan bandara internasional Pattimura Ambon dan merupakan desa yang pernah disebut sebagai desa dengan manajemen dana desa terbaik tahun 2017.

DISKUSI

Manajemen Dana Desa yang dilakukan di desa Laha kecamatan teluk Ambon Baguala dilihat dari aspek-aspek Perencanaan, Perorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan adalah. Pada aspek perencanaan sebagaimana hasil investigasi yang dilakukan menunjukkan perencanaan pembangunan yang ada di desa telah dilakukan tetapi belum maksimal dilihat dari pemerintah desa masih belum maksimal melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, dalam mengadakan musyawarah pembangunan desa untuk menggunakan Dana Desa hal ini kita dapat lihat hasil pembuatan RPJMDes dan RKPDes banyak yang tidak diketahui masyarakat tetapi hanya berdasarkan pemikiran pemerintah desa dan pemerintah kecamatan bahkan Kabupaten, padahal perencanaan adalah dalam Darma Salam (2007) adalah usaha membuat suatu pilihan tindakan dari berbagai alternative yang mungkin dapat tersedia yang meliputi aspek strategi, kebijakan, program proyek dan prosedur dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam hal ini pemerintah pusat yang menghibahkan Dana Desa kepada pemerintah daerah untuk disalurkan kepada pemerintah desa untuk digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan desa, dan desa Laha sebagai salah satu penerimanya harus mampu maksimal mempergunakannya. Pembangunan yang menggunakan dana desa dilakukan dengan dengan mengacu pada peraturan perundang peraturan menteri dalam Negeri no 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa di dalam perencanaan pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu menekankan pada 3 (tiga) komponen penting yaitu pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan manusia. Namun, di Desa Laha menekankan hanya pada pemberdayaan lingkungan dan pemberdayaan manusia saja. Untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, belum banyak kelompok-kelompok usaha atau UMKM desa yang dikoordinir dan dibiayai oleh desa, Usaha-usaha kecil yang dilakukan masyarakat merupakan usaha mandiri dengan modal yang terbilang sedikit dari desa dan selebihnya mereka mendapatkan modal dari pihak luar seperti bank dan pihak pemberi modal lainnya. Pemberdayaan manusia tergambar dari ikut berperannya organisasi kepemudaan desa yaitu pemuda-pemudi gereja, karang taruna dan kaum perempuan PKK desa Laha yang notabene sangat antusias dalam program pemberdayaan manusia. Program pemberdayaan ini sebagian besar anggarannya bersumber dari pemerintah daerah. Pemerintah desa memberikan porsi yang kecil dibandingkan pemerintah daerah. Hal ini sangatlah mengecewakan masyarakat karena seyogyanya aparatur desa lebih bersumbangsih kepada masyarakatnya ketimbang pemerintah daerah karena dana desa yang telah diberikan kepada desa tersebut.

Berdasarkan hasil survey dan wawancara peneliti dengan pihak-pihak terkait, bahwasannya informan memberikan penjelasan beserta bukti-bukti pengelolaan dana desa Laha yang secara keseluruhan dalam 3 tahun sebelumnya dana desa Laha telah dialokasikan secara tepat, namun dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini pengelolaan dana desa belum memuaskan rakyat dikarenakan beberapa faktor diantaranya :

1. Kepala desa Laha belum sepenuhnya melibatkan warga desa dalam beberapa pertemuan terkait rencana pengelolaan dana desa
2. Unsur kekerabatan terdekat masih mendominasi keputusan pengelolaan dana desa, dimana orang terdekat yang lebih didahulukan dalam alokasi dana desa
3. Belum terlihat kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diusung oleh desa.

- Pemberdayaan masyarakat biasanya dilakukan oleh beberapa pihak luar seperti akademisi dan LSM serta lembaga non profit. Desa tidak terlalu berkontribusi dalam kegiatan atau program pemberdayaan manusia
4. Minimnya akses informasi kepada masyarakat terkait alokasi dana desa sehingga masyarakat tidak mengetahui seberapa besar anggaran yang dikeluarkan untuk program pembangunan desa. Mereka lebih memilih wait and see sehingga pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa tidak optimal

KESIMPULAN

Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Laha kecamatan teluk Ambon Baguala secara normatif dan administratif sudah baik. Namun, secara substansi ada beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pengawasan, pertanggung-jawaban, dan transparansi yang belum maksimal karena masyarakat tidak banyak mengetahui akan adanya kegiatan tersebut. Peran stakeholder pada pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Laha masih belum maksimal. Hanya kepala desa dan kerabat atau orang-orang terdekatnya yang terlibat aktif dalam setiap tahapan pengelolaan alokasi dana desa mulai dari perencanaan, mekanisme penyaluran dan pencairan dana, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban sampai pada transparansi anggaran. Sedangkan stakeholder lain seperti karang taruna, tim penggerak, masyarakat dan BPD peranannya hanya sebatas pada tahap perencanaan yaitu keikutsertaan dalam penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) dan tahap pelaksanaan dengan terlibatnya dalam pembangunan infrastruktur Desa Laha.

Hasil-hasil pemberdayaan masyarakat Desa Laha yang didanai oleh anggaran alokasi dana desa meliputi pemberdayaan lingkungan dan pemberdayaan manusia. Pemberdayaan ekonomi masyarakat belum optimal diorganisir oleh pemerintah desa. Sebagian penggerak ekonomi masyarakat desa laha bersumber dari pihak kampus, LSM dan lembaga nonprofit. Faktor yang mendukung pengelolaan ADD yaitu adanya peraturan yang jelas sehingga para tim pelaksana tidak kebingungan dalam mengelola anggaran ADD dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam proses pelaksanaan. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu sosialisasi yang kurang mendalam kepada masyarakat sehingga tidak semua masyarakat tahu tentang program ADD yang kemudian menyebabkan rendahnya pengawasan masyarakat pada kegiatan ADD dan dominasi pemerintah kecamatan terhadap penyusunan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD menyebabkan kurangnya kemandirian desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2013). *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Fajar, T. (2016). *Sistem Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus: Desa Temuwuh dan Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul)*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Karimah, F.dkk. (2018). *Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat*. Jurnal

- Administrasi Publik Vol.2 No.4.
- Kementerian Dalam Negeri (2007). Jakarta, Menteri Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri (2007) Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta, Menteri Dalam Negeri.
- Maspeke.R.dkk.(2017). Manajemen dana desa dalam peningkatan pembangunan desa Doloduo kecamatan Dumoga barat kabupaten Bolaang.Jurnal Eksekutif Vol 2.No.2
- Moleong, J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Nurfaisal,dkk.(2019).Akuntabilitas dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa Tegallrejo kecamatan Gendangsari Kabupaten Gunungkidul 2016.Jurnal Kosmogov Vol 5 No.1
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Rozaki, Abdur, dkk. (2005). *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta, IRE Press.
- Sumaryadi, I Nyoman. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta, Citra Utama.
- Terry, G R dan Rue, L W. 2010. *Dasar- Dasar Manajemen*. Cetakan Kesebelas. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.